



Laporkan Pungli ke 08112929000

Satgas Saber Pungli DIY Ajak Masyarakat Terlibat Aktif

Untuk masyarakat di DIY, jika menemukan pungli dapat lapor ke UPP DIY di nomor telepon 0274-884444, sedangkan lapor via SMS dapat ke nomor 08112929000

Kombes Pol Budi Yuwono
Irwanda dan Ketua Tim Satgas Saber Pungli Polda DIY



YOGYA. TRIBUN - Kasus tertangkaphya seorang staf atau tenaga bantu (Naban) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dalam pungutan liar (pungli) atau pemerasan oleh Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda DIY, pada 18 Januari lalu masih dalam pengembangan. Selain itu, Satgas Saber Pungli Polda DIY mengajak masyarakat ikut memberantas pungutan liar (Pungli). Hal itu dapat dilakukan dengan tak sungkan-sungkan melaporan kepada pihaknya jika menjadi korban atau mengetahui adanya tindakan pungli di

masyarakat.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda DIY, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Gatot Budi Utomo mengatakan, pengembangan tersebut guna mengetahui ada tidaknya indikasi tersangka lain yang turut serta dalam aksi pungli yang dilakukan Iwan Ariwanto (40), warga Cokrodingratan, Jetis, Kota Yogyakarta kepada Direktur Netcity.

● ke halaman 11



TRIBUN JOGJA/HASAN SAGRI

OPERASI - Petugas kepolisian membawa tersangka pungli saat jumpa pers di Mapolda DIY, Selasa (23/1). Petugas mengamankan tersangka berinisial IA yang berkerja di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Laporkan Pungli ke 08112929000

• Sambungan Hal 1

"Sementara (kasus pungli naban DLH, **Red** masih dalam pengembangan. Akan kita kembangkan untuk mengetahui ada pihak lain tidak yang terlibat," katanya, Rabu (24/1).

Sementara itu, Inspektur Pengawas Daerah (Irwad) Polda DIY sekaligus Ketua Tim Satgas Saber Pungli Polda DIU Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), Budi Yuwono mengatakan, pihaknya terus berupaya memberantas pungli yang beredar di masyarakat dewasa ini.

la menambahkan, pemberantasan pungli dapat terwujud dengan peran serta masyarakat. Untuk itu ia meminta warga bersedia melaporkan kepada Tim Saber Pungli apabila menjadi korban maupun mengetahui tindak pungli yang terjadi di masyarakat.

"Saat ini, masyarakat luas dapat langsung melaporkan hal tersebut ke Unit Pemberantasan Pungli (UPP) pusat maupun melalui UPP di daerah," pesannya.

Nomor telepon

Bagi masyarakat yang ingin melaporkan praktik pungutan liar (pungli), pemerasan atau sejenisnya, dapat langsung melapor ke UPP pusat, dengan menghubungi *call center* di nomor 193/082112131323 dan untuk pesan pendek atau *short message service* (SMS) dapat ke nomor 1193/08568880881.

Masyarakat juga dapat mengirimkan email di lapor@saberpungli.id dan untuk laporan ke Satgas Pusat, dapat mengirimkan email ke saberpungli@polkam.go.id.

Sebagai informasi, selama terbentuknya Tim Satgas Saber Pungli Polda DIY sejak November 2016 lalu, telah dilakukan berbagai penindakan dan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait masalah pungli. Bahkan sudah puluhan kasus yang ditangani tim tersebut ada yang merupakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan pelaporan dari masyarakat.

"Selama setahun lebih ini, tim kami sudah bergerak dan total sudah 23 kali kami tangani kasus terkait pungli, dua di antaranya hasil OTT dan ada yang dari pelaporan juga. Paling banyak itu masalah parkir baik di Kota Yogya dan Gunungkidul," katanya, Selasa (23/1).

Ditambahkannya, bahwa pada tahun ini, Tim Saber Pungli Polda DIY akan melakukan hal yang berbeda dari tahun lalu guna mewujudkan DIY bebas pungutan liar dan aksi pemerasan dan sejenisnya di masyarakat.

"Untuk tahun 2018 ini lebih ditekankan kepada upaya penindakan, karena tahun 2017 sudah kita lakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai pungli," katanya.

Urus langsung

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menjelaskan bahwa tenaga bantu aiau naban tersebut akan terkena sanksi tegas karena telah menodai komitmen. Atas kejadian tersebut, Heroe meminta Tim Saber Pungli untuk lebih giat melakukan tugasnya.

"Ini harus jadi yang terakhir terjadi di lingkungan Pemkot, supaya pelayanan yang bersih, bertanggung jawab, dan transparan dapat kita jaga. Proses in gang (Izin Pembuatan Jalan Masuk) sebenarnya sudah selesai, tapi kok bisa memanfaatkan hal seperti ini. Apalagi jadi semacam calo untuk menguruskan sesuatu," jelasnya.

Ia pun mengimbau masyarakat agar jangan mudah mempercayakan urusan perizinan kepada orang lain dan lebih berhati-hati ketika yang bersangkutan meminta sejumlah uang.

"Kepada seluruh pemilik usaha agar mengurus perizinan langsung kemari, supaya jelas dan tidak ada pungutan seperti itu. Tidak ada calo-caloan," tegas Heroe.

Terkait status naban yang tertangkap Tim Saber Pungli, ia mengatakan masih akan mengkaji apakah bisa langsung dijatuhkan sanksi, karena dianggap melanggar perjanjian kontrak atau harus menunggu proses pengadilan selesai.

"Nantinya apakah bisa diberhentikan, tapi yang jelas harus ada sanksi tegas. Tenaga kontrak yang memiliki iktikad tidak baik bisa kita coret. Tak ada ampun bagi yang mencoreng," tuturnya.

Ke depan, ia meminta Inspektorat untuk melihat potensi-potensi yang muncul. Menurut Heroe, kasus ini telah menjadi peringatan. Terlebih saat ini pemerintah tengah menata sistem perizinan yang lebih

transparan dan bisa dilakukan *check and balance*.

"Harus cepat, bisa dipertanggungjawabkan, transparan, serta memberikan fasilitas untuk menekan biaya yang tidak perlu. Ini supaya mendorong iklim usaha yang berdaya saing kuat, dan pungli ini kan melemahkan daya saing usaha," ujarnya.

Pungli Rp27,5 juta

Awalnya, Tim Saber Pungli Polda DIY mendapatkan laporan korban, yakni Direktur Neticity yang merasa dirugikan belasan juta terkait pembuatan IMB melalu tersangka Iwan Ariwanto. Korban diminta syarat lebih guna melancarkan penerbitan IMB terkait bangunan korban.

"Enam bulan yang lalu, pelaku sudah diberi uang Rp15 juta dari korban untuk buat IMB Neticity, tapi tidak selesai sampai sekarang. Setelah ditanyakan kepada pelaku, katanya harus punya izin In Gang dulu, dan pelaku memaksa korban membayar uang Rp12,5 juta," katanya.

"Padahal, korban telah mengganti pohon pucuk merah sebanyak 50 batang kepada DLH. Korban bersedia, karena pelaku bilang akan memengaruhi permohonan IMB-nya jika tak diurus, maka dibayarkan sejumlah uang tersebut," imbuhnya.

Namun sebelum melakukan transaksi tersebut, Tim Polda bersiap di lokasi transaksi untuk meringkus korban beserta dengan barang bukti sejumlah uang hasil pemerasan pelaku.

Setelah digelandang ke Mapolda DIY, pelaku yang merupakan tenaga bantu yang lebih dari lima tahun bekerja di DLH Kota Yogyakarta itu mengaku baru pertama kali melakukan pungli. (rid/kur)

Suyana: Tidak Ada Staf DLH Terlibat

KEPALA Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Suyana yakin bahwa staf lain yang berada di bawahnya tidak ada yang melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat.

"Saya bertanya dengan anak-anak (staf DLH), *nggak lah*. Itu oknum. Dia juga tidak punya kewenangan menerbitkan izin. Saya cenderungnya itu adalah pemerasan karena mengancam, karena nanti kalau tidak dikasih uang tidak dikeluarkan (IMB)," bebarnya melalui

sambungan telepon, Rabu (24/1).

Menurutnya pengurusan izin melalui DLH adalah urusan yang salah kamar. Suyana menegaskan, semua urusan terkait perizinan adalah wewenang Dinas Perizinan.

"Semua yang perizinan harus datang ke perizinan untuk mengurus izin. Bukan datang di DLH. DLH *kan nggak* mungkin ngurus perizinan," tandasnya.

Disinggung mengenai sanksi terhadap oknum tersebut, ia menjelaskan

bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan Inspektorat apakah perlu dihentikan sementara atau ada putusan lain.

"Nantinya pasti dicopot (dari jabatannya di DLH). Itu saya tunjukkan ke teman-teman saya. Jangan main-main melayani masyarakat, (layani) yang baik. Kalau dia (oknum) nanti terbukti, pasti akan dikeluarkan dari dinas," tegasnya.

● ke halaman 11

Suyana: Tidak Ada Staf DLH

● Sambungan Hal 1

Investigasi lanjut

Sementara itu, Koordinator Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogyakarta, FX Harry Cahya menjelaskan bahwa masih adanya pungutan liar (pungli) di lingkungan pemerintah kota menjadi pintu bagi pihaknya untuk melakukan investigasi lebih lanjut, baik

terkait antikorupsi maupun integritasnya.

"Bagi Forpi ini pintu menindaklanjuti integritas PNS, apalagi nabab (tenaga bantu) bisa melakukan hal itu. Mereka selama ini diperbantukan, belum punya kewenangan apa-apa, tapi bisa pungli," ungkapnya sesuai menggelar jumpa pers, di Sekretariat Forpi Kota Yogyakarta.

Menurutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta harus segera menjadikan hal ini sebagai perhatian serius. Harry menu-

turkan, pemerintah perlu menerapkan disiplin dari awal nabab dipekerjakan.

"Harus dilakukan pembinaan dari awal dan dilakukan rekrutmen secara objektif," urainya.

Terkait adanya kemungkinan pihak lain yang terlibat kasus serupa, Harry enggan berspekulasi.

"Posisi OTT untuk investigasi integritas, bukan ke penyidikan dan penyelidikan. Tapi bagaimana struktur itu melaksanakan tugasnya," tandas Harry. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			
3. BKPP			

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005